

Proceeding
Seminar Internasional
Forum FIP- JIP se Indonesia

MEDAN, 29 - 31 Oktober 2013

BUKU 2
MAKALAH
Sumbangan
Jurusan:
AP, TP, dan PAUD

T e m a:
PENGUATAN ILMU PENDIDIKAN UNTUK
MENGHASILKAN LULUSAN TERDIDIK DALAM
IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013



UNIMED PRESS

- teguh triwiganto -

PROCEEDING

Buku 2 : Makalah Sumbangan Jurusan : AP, TP, dan PAUD

SEMINAR INTERNASIONAL

FORUM FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN - JURUSAN ILMU PENDIDIKAN
(FIP-JIP) se INDONESIA
29-31 Oktober 2013

T e m a:

PENGUATAN ILMU PENDIDIKAN UNTUK MENGHASILKAN LULUSAN
TERDIDIK DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013

Editor:

Prof. Dr. Yusnadi. MS.

Drs. Wildansyah Lubis, M.Pd.

Diselenggarakan oleh :

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan
Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate

Diterbitkan oleh:

Unimed Press

2013



UNIMED PRESS

Proceeding Makalah Sumbangan Seminar Internasional
Forum FIP-JIP se-Indonesia, 29 - 31 Oktober 2013
Penguatan Ilmu Pendidikan untuk Menghasilkan Lulusan Terdidik dalam
Implementasi Kurikulum 2013

ISBN : 978-602-7938-63-2

Editor : Prof. Dr Yusnadi, MS.
Drs. Wildansyah Lubis, M.Pd.

Reviewer : Prof. Dr. Siman Nurhsdi, M.Pd.
Dr. Anita Yus, M.Pd.
Dr. Naeklan Simbolon, M.Pd.
Drs. Eduard Purba, MA
Dra. Rahmulyani, M.Pd.
Drs. Rahim Sitompul, MS
Nani Barorah, S.Psi, MA

Tata letak : Elfi Farida, S.Pd.

Desain Sampul : Panitia Forum FIP-JIP

Cetakan Pertama : Oktober 2013

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002
tentang Hak Cipta**

Pasal 72:

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menjiplak, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Assalamu'alaikum

Puji syukur
kita dapat melak
Seminar Internas
yang pada tahun
rumah.

Forum FIP
bahwa pada tah
sumbangan pemil
karakter bagi gen
Fakultas Ilmu Per
pendidikan yang

Buku Prece
terdiri dari Maka
masing-masing Ju
masing Jurusan.
Indonesia ini dap
permasalahan pen

Namun der
itu dimohon saran
yang lebih bermal

Wassalam.

Panitia.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat ALLAH SWT, karena dengan seizin-NYA kita dapat melaksanakan Forum FIP-JIP se-Indonesia yang dirangkaikan dengan Seminar Internasional berlangsung dari tanggal 29 s.d 31 Oktober 2013 di Medan yang pada tahun ini dipercayakan kepada FIP Universitas Negeri Medan sebagai tuan rumah.

Forum FIP-JIP pada tahun ini merupakan pertemuan yang istimewa mengingat bahwa pada tahun ini pula Kurikulum 2013 mulai diberlakukan. Ide-ide dan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan pendidikan terutama pendidikan karakter bagi generasi muda dalam rangka menyongsong generasi emas 2045. Forum Fakultas Ilmu Pendidikan - Jurusan Ilmu Pendidikan ini sangat berarti bagi kemajuan pendidikan yang akan memberi corak dan warna pendidikan masa yang akan datang.

Buku Preceeding ini terdiri dari 3(tiga) Buku. Buku 1, memuat Makalah Utama terdiri dari Makalah dari Luar Negeri, Makalah Wajib, dan Makalah Terseleksi dari masing-masing Jurusan, Buku 2 dan Buku 3 adalah Makalah Sumbangan dari masing-masing Jurusan. Semoga Proceeding Seminar Internasional Forum FIP-JIP Se-Indonesia ini dapat mencapai tujuannya dengan memberi peluang jalan penyelesaian permasalahan pendidikan kita.

Namun demikian Panitia menyadari Proceeding ini jauh dari sempurna, untuk itu dimohon saran perbaikan dari pembaca, kelak dikemudian hari kita raih kesuksesan yang lebih bermakna.

Wassalam.

Panitia.

DAFTAR ISI

BUKU 2 : MAKALAH SUMBANGAN JURUSAN AP, TP, dan PAUD

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii

BAGIAN IV : MAKALAH-MAKALAH SUMBANGAN

4.1. JURUSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN	3-195
4.1.1 PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI UNTUK PENGUATAN KOMPETENSI KEPALA SEKOLAH Endang Herawan	3
4.1.2 IMPLEMENTASI SUPERVISI PENGAJARAN SEBAGAI SALAH SATU STRATEGI PENGUATAN KOMPETENSI KEPALA SEKOLAH Ahmad Yusuf Sobri	13
4.1.3 PROFESIONALISME KEPALA SEKOLAH sebagai SUPERVISOR PERSEKOLAHAN yang TERDIDIK Sulasminten	20
4.1.4 PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP PENGELOLAAN PEMBELAJARAN OLEH DOSEN PADA FIP UNP Nelfia Adi	27
4.1.5 PEMBINAAN PEGAWAI TATA USAHA OLEH KEPALA SEKOLAH Ermita dan Anisah	40
4.1.6 PENGUATAN KEMAMPUAN MANAJEMEN KEPALA SEKOLAH SEBAGAI PEMIMPIN KEPENDIDIKAN DALAM KETERLAKSANAAN IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 Aman Simaremare	58
4.1.7 ENHANCEMENT OF PRINCIPAL PROFESSIONALISM AS MANAGERS AND SUPERVISORS THROUGH THE ASSESSMENT OF JOB PERFORMANCE Yasaratodo Wau	58
4.1.8 MODEL PEMBERDAYAAN TENAGA ADMINISTRASI BERKARAKTER PADA IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 Erny Roesminingsih	81

4.1.9	KARAKTER BANGSA UNTUK PENGUATAN KOMPETENSI ADMINISTRATOR & SUPERVISOR PERSEKOLAHAN Teguh Triwiyanto	90
4.1.10	PENGUATAN KEPERIBADIAN KEPALA SEKOLAH BERBASIS MORAL SPIRITUAL DALAM MENGIMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER H. Imron Arifin	104
4.1.11	PENGUATAN KOMPETENSI ADMINISTRATOR DAN SUPERVISOR PERSEKOLAHAN YANG TERDIDIK H. Syaiful Sagala	118
4.1.12	PENGUATAN KOMPETENSI KEPALA SEKOLAH DALAM MENGAWAL KEBERHASILAN IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 Karwanto	129
4.1.13	KOMPETENSI GURU DAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI KOTA PADANG Irdamurni	144
4.1.14	PENGUATAN LANDASAN KEILMUAN PENDIDIKAN DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 Deitje Adolfien Katuuk	157
4.1.15	MODEL KEMITRAAN PROGRAM AKTA KEKEPALA SEKOLAHAN JURUSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR Andi Cudai Nur	169
4.1.16	AUDIT MANAJEMEN SEKOLAH BERDASARKAN STANDAR MUTU PENDIDIKAN; (Suatu Prospek Kebijakan Pendidikan) Ratmawati, T.	184
4.2.	JURUSAN KURIKULUM DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN	197-470
4.2.1	PEMBELAJARAN INOVATIF BERBASIS LINGKUNGAN DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 SEBAGAI UPAYA Mendukung Keterampilan Abad 21 I Gde Wawan Sudatha	197
4.2.2	PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN MODUL INTERAKTIF Ida Murni Saan	219
4.2.3	INTEGRASI TEKNOLOGI DALAM PENYIAPAN SUMBER	

	BELAJAR BERBASIS LINGKUNGAN UNTUK MENUNJANG IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 Luh Putu Putrini Mahadewi	230
4.2.4	PEMANFAATAN LINGKUNGAN PEMBELAJARAN BERBASIS <i>e-LEARNING</i> SEBAGAI SUMBER BELAJAR DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM 3012 Nurhikmah H	239
4.2.5	PEMBELAJARAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM KURIKULUM 2013 Rusman	252
4.2.6	AKTUALISASI KONSTRUKTIVISTIK DAN BEHAVIORISTIK DALAM LINGKUNGAN BELAJAR BERBASIS ICT Darmansyah	267
4.2.7	PENGEMBANGAN <i>COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION</i> MODEL <i>WEB BASED LEARNING</i> TIPE TUTORIAL MATA PELAJARAN TI&K SMA Fetri Yeni J	275
4.2.8	EDUCATIONAL CHANGE AND IMPLEMENTATION IN TEACH- ING AND LEARNING PROCESS Naeklan Simbolon Naeklan Simbolon	283
4.2.9	APLIKASI SISTEM INFORMASI DAN PEMBELAJARAN BERBA- SIS ICT Nofri Hendri	289
4.2.10	PEMANFAATAN LINGKUNGAN SEBAGAI SUMBER BELAJAR DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 Zelhendri Zen	303
4.2.11	PERAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN DALAM PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS TIK TERINTEGRASI DALAM PROSES PEMBELAJARAN PADA KURIKULUM 2013 R. Mursid	309
4.2.12	MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS ICT Sahat Siagian	329
4.2.13	PENGARUH STRATEGI PEMBELAJARAN BERPOLA PEMBER- DAYAAN BERPIKIR MELALUI PERTANYAAN (PBMP) DENGAN <i>THINK PAIR SHARE (TPS)</i> TERHADAP RETENSI BELAJAR BIOLOGI SISWA MULTINETNIS DI SMP KOTA SAMARINDA Vandalita Maria Magdalena Rambitan	341
4.2.14	PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN <i>STUDENT FACILITAT-</i>	

OR AND EXPLAINING TERHADAP HASIL BELAJAR ENTO- MOLOGI MAHASISWA SEMESTER VII PENDIDIKAN BIOLO- GI FKIP UNMUL SAMARINDA Sonja. V.T Lumowa, Sri Purwati	353
4.2.15 PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASA- LAH UNTUK MENGEMBANGKAN PEMAHAMAN KONSEP DALAM PENINGKATAN PRESTASI MAHASISWA PADA MATA KULIAH FISIKA UMUM I Pintor simamora., Juniar hutahae., dan Derlina.	363
4.2.16 THE EFFECT OF DIVERGENT THINKING LEVEL IN LEARN- ING MODELS WITH STUDENT CENTERED LEARNING APPROACH ON STUDENT CREATIVE THINKING PROCESS Eva Marlina Ginting, and Satria Mihardi	380
4.2.17 TEACHING MECHANICS BY MODEL OF MATTER KNOW- LEDGE STRUCTURE ANALYSIS (ASPM) FOR THE INCREASING OF SCIENCE GENERIC SKILL OF COLLEGE STUDENT OF PHYSICS DEPARTMENT OF FMIPA UNIMED Karya Sinulingga, Nurdin Bukit, Dewi Wulandari, Yul Ifda Tanjung	388
4.2.18 THE DEVELOPMENT OF LEARNING WITH PHYSICS IPA MODELS FOR LEARNING COMPUTER AIDED WILE ANALYTICAL THINKING SKILLS, CRITICAL, AND CREATIVE OF JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENTS IN THE CITY FIELD Ratelit Tarigan., Derlina., dan Mariaty Sipayung	403
4.2.19 DIFFERENCE LEARNING OUTCOMES OF BIOLOGY SCIENCE IN CLASS VII THROUGH COOPERATIVE LEARNING THE POWER OF TWO AND INDEX CARD MATCH IN JUNIOR HIGH SCHOOL 35 SAMARINDA Evie Palenewen, Budianto	415
4.2.20 PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN FISIKA BERBASIS PEMECAHAN MASALAH BERBANTUAN VIDEO TERHADAP KOGNISI DAN METAKOGNISI MAHASISWA Mariati Purnama Simanjuntak	428
4.2.21 URGENSI LEMBAGA TEKNOLOGI PEMBELAJARAN DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 Budiyo	438
4.2.22 MODEL PENGINTEGRASIAN PEMBELAJARAN IPS BERBASIS KURIKULUM 2013 PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA Hidayat	454

4.3.	JURUSAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	473-679
4.3.1	PERAN TENAGA PENDIDIK ANAK USIA DINI DALAM MENGEMBANGKAN MODEL PEMBELAJARAN BERMAIN PERAN BAGI ANAK USIA DINI Syahrul Ismet	473
4.3.2	PERAN GURU DALAM PEMBELAJARAN <i>PROJECT APPROACH</i> ANAK USIA DINI Ade Dwi Utami	484
4.3.3	GAMBARAN INTERAKSI MEDIATIF GURU DENGAN ANAK TAMAN KANAK-KANAK DI JAKARTA Agustina Hendriati	508
4.3.4.	MODEL BERMAIN SIMBOLIK BERBASIS KOMPETENSI DAN BERKONTEKS CERITA RAKYAT UNTUK MENGEMBANGKAN KARAKTER ANAK USIA DINI Anita Yus	523
4.3.5	INTERPERSONAL INTELLIGENCE OF PRE-SCHOOL CHILDREN Budi Rahardjo	536
4.3.6.	THE IMPLEMENTATION OF STAY AND STRAY STRATEGY OF COOPERATIVE LEARNING IN READING ENGLISH TEXT FOR THE STUDENTS OF EARLY CHILDHOOD TEACHER EDUCATION PROGRAM AT UNIVERSITAS NEGERI PADANG Elise Muryanti, M.Pd	569
4.3.7	ENHANCING THE CREATIVE DANCE MOVEMENT THROUGH PRETEND PLAY Melina Surya Dewi	581
4.3.8	PENTINGNYA NILAI AGAMA DAN MORAL BAGI ANAK USIA DINI Nurmayani	593
4.3.9	HAKIKAT BERMAIN SAMBIL BELAJAR PADA ANAK USIA DINI Rakimahwati	606
4.3.10	PERAN TENAGA PENDIDIK ANAK USIA DINI DALAM MENGEMBANGKAN MODEL PEMBELAJARAN BERMAIN PERAN BAGI ANAK USIA DINI Samsiah	620
4.3.11	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN KOMPETENSI PENDIDIK-NYA Solfema	633

4.3.12	MODEL PENDIDIKAN KARAKTER PARTNERSHIP Sri Indah Pujiastuti	644
4.3.13	REFLEKSI FILOSOFIS PEDAGOGIS PENGEMBANGAN MODEL PENDIDIKAN GURU PAUD YANG TERDIDIK Ahmad Samawi	656
4.3.14	PENDIDIKAN KELUARGA MEMBENTUK KARAKTER ANAK USIA DINI Yarmis Hasan.....	665

KARAKTER BANGSA UNTUK PENGUATAN KOMPETENSI ADMINISTRATOR & SUPERVISOR PERSEKOLAHAN

Oleh : Teguh Triwiyanto

Dosen Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang

Abstrac: *The purpose of writing is to describe the management problems of educators, staff - especially human administrators and supervisors - and efforts to overcome them in the framework of strengthening the nation's character. Paradigm shift in the management of national education was also not giving a blessing to the improvement of the quality of administrators and supervisors. The education sector is the key, without neglecting other sectors, because in this sector development activities to focus the nation's character. Frame the nation's character is character, character, character, or personality are formed from the internalization of various virtues (virtues) are believed and used as a basis for perspective, think, behave, and act.*

Keywords: national character, administrators, and supervisors

Rahasia untuk membangun karakter bangsa yaitu pendidikan harusnya membantu rakyat untuk menemukan perangkat karakter mereka sendiri dan membantu mereka untuk bertindak berdasar perangkat karakter tersebut. Ladang untuk menyemai karakter bangsa yaitu pendidikan, sebab karakter bangsa lahir dari rahim pendidikan. Karakter, sebagaimana kebudayaan dan alam, tidak bisa dibiarkan berkembang dengan sendirinya.

Pemimpin bangsa pendahulu kita, melaluinya karakter bangsa tampak nyata, merupakan produk pendidikan pada masanya. Hatta, Syahrir, Tan Malaka, Sukarno dan pemimpin bangsa pada saat itu merupakan produk pendidikan masa kolonial-Belanda. Mereka merupakan generasi yang lahir mendahului negara Indonesia, saat pendidikan belum menyentuh level paling bawah rakyat. Anak-anak bangsa itu tumbuh berkembang dan memperoleh "balas budi" dari penjajah. Belanda yang pada tahun 1867 mendirikan *Eredienst en Nijvirheit* yang khusus menangani pendidikan di Hindia Belanda (Indonesia waktu itu) memberikan kesempatan kaum pribumi menikmati pendidikan.

Pendidikan "barat" yang dinikmati kaum pribumi waktu itu tidak melunturkan semangat kecintaan tanah air, bahkan nasionalisme mereka mengeras saat membela kepentingan rakyat karena hak-haknya ditindas penjajah. Hatta tetap Hatta, sosok religius-sederhana, tidak tercerabut dari akar budaya, padahal pendidikan barat dienyam dari anak-anak sampai dewasa. Syahrir tetap Syahrir, sosok yang kukuh mempertahankan kepentingan rakyat banyak di atas segala-galanya. Tan Malaka,

pemimpin revolusioner-sederhana yang tidak berpamrih dan rela terlunta-lunta untuk sebuah keyakinan. Soekarno merupakan sosok-tokoh yang kemudian mampu membangunkan rakyat dari mimpi kemerdekaan, bersama Hatta. Kelak dikemudian hari mereka menjadi pemimpin dengan integritas karakter baik, tidak sekedar menggung nasional juga internasional.

Karakter bangsa dari produk pendidikan berbeda tiap zamannya. Generasi orde baru kebanyakan mengenyam pendidikan di bawah sistem pendidikan Nasional-Indonesia. Bandingkanlah karakter bangsa generasi orde baru dengan karakter bangsa masa awal kemerdekaan, melalui puncak-puncak karakter pemimpinnya. Masa orde baru, semangat menjadikan kepentingan bangsa-negara tenggelam oleh kepentingan individu dan kelompok. Karakter dan moralitas menjadi barang remeh temeh; korupsi, jual beli perkara hukum, sementara rakyat hanya dijadikan alat politik semata-mata. Pada level ini pendidikan tidak berhasil membangun dan merekonstruksi karakter anak bangsa. Pemimpin bangsa yang korup hanya contoh kecil bagaimana lemahnya karakter dan moralitas hancur dan telanjang di depan mata tanpa mampu dicegah.

Memang hidup di dunia yang penuh dengan informasi terbuka dan massif memberikan corak hidup berbeda dibandingkan waktu-waktu sebelumnya, baik di Indonesia maupun negara-negara lain. Sebuah studi yang dilakukan terhadap 7.000 orang remaja menunjukkan bahwa remaja zaman sekarang merupakan generasi yang sangat terasingkan. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu sendirian dibandingkan generasi sebelumnya, hanya sedikit yang mengaku memiliki sahabat-sahabat dekat, dan hampir seluruhnya memilih tidur sebagai kegiatan yang paling disukai (Schneider & Stevenson, 1999). Walaupun tidak mudah menuding sekolah sebagai penyebab utama perubahan perilaku remaja tersebut, tetapi tak diragukan lagi, prestasi akan terhambat dalam atmosfer kelas yang ramah dan terduga di bawah bimbingan pendidik yang ramah dan dekat dengan peserta didik.

Tampak dari paparan di atas, pendidikan memberikan sumbangan terhadap pembinaan karakter bangsa. Paparan di atas juga memperkuat bahwa saat ini ini, di Indonesia terdapat persoalan terkait dengan pengelolaan (manajemen) pendidikan. Artinya, manajemen pendidikan nasional belum mampu menjalankan fungsinya membentuk karakter bangsa yang mumpuni. Karakter bangsa tersebut tercermin dari perilaku-perilaku anak bangsa yang menjunjung tinggi-tinggi nilai kemanusiaan dibandingkan bangsa lain.

Ganda terdepan dari manajemen pendidikan nasional yaitu pendidik dan tenaga kependidikan, tidak terkecuali administrator dan supervisor. Mereka yang langsung berurusan dengan peserta didik, menjadi sumber belajar, contoh, dan menjadi inspirasi bagi peserta didik.

Revisi paradigma manajemen pendidikan nasional ternyata juga belum memberikan perbaikan mutu administrator dan supervisor. Sektor kependidikan merupakan kunci, tanpa mengabaikan sektor lain, sebab pada sektor ini

aktifitas pengembangan sumber daya manusia menjadi fokusnya. Artinya, melalui perbaikan pendidikan akan terangkat perbaikan sumber daya manusia Indonesia yang pada gilirannya akan memperbaiki mutu manusia Indonesia, termasuk didalamnya karakter bangsa.

Perbaikan pendidikan sendiri menghadapi persoalan, salah satunya manajemen pendidik dan tenaga kependidikan di Indonesia belum bebas dari persoalan. Salah satu persoalan yaitu nasib pendidik sekolah-sekolah-swasta di sejumlah daerah masih terabaikan. Banyak pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapat gaji di bawah upah minimum kabupaten. Gaji mereka antara Rp 75.000 sampai dengan Rp 200.000 per bulan, sementara upah minimum regional atau kabupaten berkisar Rp 800.000 sampai dengan Rp 1.200.000. Padahal, pendidik-pendidik tersebut ikut berperan besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa (Kompas, Rabu 4 Mei 2011). Jauhnya jarak antara gaji dengan UMR memperlihatkan betapa penghargaan kepada para pendidik (pendidik) belum dihargai semestinya. Program sertifikasi dari pemerintah belum mampu menyentuh banyak.

Sementara itu keterampilan dasar pendidik sampai sekarang masih belum merata dikuasai sehingga mutu pendidikannya pun tidak seimbang antar daerah. Maisyaroh dan Suryani (2004:4) mengatakan bahwa dalam sistem pembelajaran, pendidik semestinya menerapkan ketrampilan dasar mengajar dengan derajat ketepatan yang bervariasi.

Permasalahan dan tantangan di atas memperlihatkan bagaimana persoalan administrator dan supervisor membutuhkan pola penanganan sistematis, terutama berkaitan dengan pembentukan karakter bangsa. Indikator-indikator yang menghalang-halangi usaha memajukan ini tentu saja dapat dirubah dan dibuang jauh-jauh. Memberangus indikator-indikator negatif tersebut tentu membutuhkan tenaga luar biasa besar dari seluruh komponen bangsa. Sementara itu administrator dan supervisor menjadi kunci untuk melandasi perubahan ke arah lebih baik lagi. Optimalisasi kinerja administrator dan supervisor tentu saja masih dipercaya menjadi gerbong perbaikan mutu karakter bangsa ini. Perubahan suatu bangsa banyak ditentukan oleh sektor pendidikan, terutama administrator dan supervisor, sudah banyak contoh suatu bangsa maju karena pendidikannya.

Administrator dan Supervisor; Penguatan Karakter

Landasan legal formal mengenai karakter bangsa dapat ditemui dalam pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa. Karakter bangsa melalui pendidikan diwujudkan dalam suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang

berhikmat dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Untuk mengelola kegiatan-kegiatan tersebut, maka manajemen pendidik dan tenaga kependidikan menjadi sangat penting perannya.

Tata kelola administrator dan supervisor kependidikan Indonesia memang mulai menunjukkan kecenderungan membaik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penilaian dan pemberian tunjangan sebagai alat untuk mendorong kesejahteraan pendidik mulai berjalan, walaupun di sana sini masih ada beberapa kekurangan. Salah satu kekurangan yaitu masih banyak pendidik dan tenaga pendidik swasta, GTT/PTT, dan pendidik dan tenaga pendidik di daerah terpencil kurang tersentuh kebijakan kesejahteraan ini.

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah delapan tahun terakhir ini menunjukkan perhatian terhadap pendidik dan tenaga kependidikan ini semakin baik. Beberapa contoh dari hal tersebut yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor, Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2008 mengenai Tenaga Administrasi Sekolah, Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, penilaian kinerja guru, dan lain-lainnya.

Pengakuan kedudukan pendidik sebagai tenaga profesional merupakan bagian dari pembaharuan sistem pendidikan nasional yang pelaksanaannya memperhatikan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, ketenagakerjaan, keuangan, dan pemerintahan daerah. Sehubungan dengan hal itu, maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen menjadi sangat penting.

Selain itu juga terdapat peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan. Peraturan ini memuat tentang bagaimana awal mula karier seorang guru dan bagaimana pengembangan karier ke depannya.

Sebelumnya, keluar Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Berdasarkan guru wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang berlaku secara nasional. Guru pada PAUD/TK/RA harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Guru pada SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dengan studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan / diampu, dan berasal dari program studi yang terakreditasi. Guru pada SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma

empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan / diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Guru pada SDLB/SMPLB/SMALB, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program pendidikan khusus atau sarjana yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Guru pada SDLB/SMPLB/SMALB, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program pendidikan khusus atau sarjana yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Guru pada SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

Kajian terdapat hubungan kemampuan guru terhadap kemampuan peserta didik menjelaskan bahwa keberadaan guru untuk membentuk karakter bangsa juga sangat kuat, tentu saja dimulai dari pembentukan karakter individual peserta didik. Suratman (2010:89) menegaskan temuannya mengenai hubungan tersebut. Kuatnya peran guru tersebut mengindikasikan dibutuhkan guru-guru dengan kompetensi yang baik sesuai dengan standar kompetensi.

Standar kompetensi guru dikembangkan secara utuh dari empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru. Standar kompetensi guru mencakup kompetensi inti guru yang dikembangkan menjadi kompetensi guru PAUD/TK/RA, guru kelas SD/MI, dan guru mata pelajaran pada SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK.

Upaya-upaya perbaikan manajemen pendidik dan tenaga kependidikan tersebut memang dilatarbelakangi mutu pendidik dan tenaga pendidik yang belum optimal dilakukan. Masih terdapat kendala dalam upaya memperbaiki manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Bahwa penyediaan pendidik berkompeten belum merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota yang meliputi pemenuhan pendidik dari jenjang pendidikan dasar sampai menengah.

Terbatasnya penyediaan pendidik berkompeten yang merata di seluruh provinsi dan kabupaten/kota disebabkan oleh terbatasnya akses pemerintah pusat terhadap pengelolaan tenaga pendidik ini. Kabupaten/kota yang memiliki kewenangan dalam distribusi pendidik, hal sebaliknya tidak setiap kabupaten/kota mempunyai stok pendidik yang memadai, belum bicara mutu. Pemerintah pusat yang sesungguhnya mengetahui kondisi secara pasti kebutuhan pendidik disetiap kabupaten/kota, tapi sayangnya tidak mampu melakukan mutasi antar daerah.

Gayung bersambut dengan kondisi penyediaan pendidik berkompeten belum merata di atas, kondisi pendidikan dasar dan indeks pembangunan pendidikan Indonesia juga belum memuaskan dan memang pada gilirannya memperlihatkan bahwa HDI –nya sangat rendah yaitu 108 dari 169 negara yang disurvei. Data tersebut juga memperlihatkan bahwa bangsa ini masih jauh dari rata-rata kualitas hidup bangsa lainnya. Kompas (20 Mei 2011) memperlihatkan buruknya kondisi Indonesia, yaitu dari mulai bayi lahir terancam kematian (peringkat 97 dari 139 negara yang disurvei), pendidikan dasar yang buruk (peringkat 55 dari 139 negara yang disurvei), kesehatan yang tidak memadai (peringkat 62 dari 139 negara yang disurvei), pengangguran yang besar (peringkat 75 dari 237 negara yang disurvei), infrastruktur tidak memadai (peringkat 82 dari 139 negara yang disurvei), resiko kegagalan negara mengancam (peringkat 61 dari 178 negara yang disurvei), dan rentannya harapan hidup (peringkat 91 dari 139 negara yang disurvei).

Jika kondisi ini terus berlarut-larut, maka pemerintah pusat yang sudah tahu duduk persoalannya – tidak meratanya distribusi pendidik – tidak akan bisa berbuat banyak. Perlu ada perbaikan tata kelola pendidik ini, terutama terkait dengan mutasi dan distribusi. Semestinya pemerintah pusat tetap memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan itu, sebab jika dikelola oleh kabupaten/kota sifanya hanya lokal semata-mata dan sulit melakukan mutasi atau distribusi pendidik antara kabupaten/kota. Berbeda misalnya pemerintah pusat memiliki kendali, tetapi tentu saja pemerintah pusat harus memiliki data base dan peta kebutuhan pendidik di setiap kabupaten/kota. Sentralisasi ini oleh Soeharto (2010:75) disebut sebagai konservatisme pemerintah pusat terhadap daerah yang masih disetujui oleh banyak kalangan.

Kisah-kisah mengenai pendidik melakukan kecurangan-kecurangan untuk lolos dari sertifikasi turut memberikan sumbangan buruknya manajemen pendidik dan tenaga pendidikan. Temuan Hidayati (2008) menyatakan bahwa timbulnya berbagai macam aksi kecurangan mulai dari ijazah palsu hingga amplop berisi uang yang mewarnai proses penilaian portofolio dalam sertifikasi pendidik adalah akibat dari ketidakadilan sistem. Oknum pendidik pun akhirnya dikambinghitamkan dalam kasus-kasus kecurangan tersebut sebagai individu yang bermental korup dan tidak patut untuk menjadi pendidik yang seharusnya dapat menjadi suri tauladan yang ideal bagi peserta didik. Padahal jika mau berpikir kritis, sebenarnya sistem sertifikasi pendidiklah yang telah memberikan kesempatan pada oknum pendidik untuk melakukan kecurangan.

Persoalan pendidik di atas juga dibarengi beberapa persoalan tenaga kependidikan yang sampai saat ini masih berjalan di tempat. Permendiknas nomor 24 tahun 2008 yang mengatur tentang tenaga administrasi sekolah juga belum dapat berjalan. Bahkan permendiknas ini tampaknya belum dilaksanakan sama sekali. Ketentuan bahwa penyelenggara sekolah/madrasah wajib menerapkan standar tenaga

administrasi sekolah/madrasah ini, selambat-lambat 5 (lima) tahun setelah Peraturan Menteri ini ditetapkan, sampai hari ini masih samar-samar terdengar.

Telaah di atas menunjukkan bahwa penguatan karakter bangsa menghadapi tantangan berat. Mereka yang semestinya menjadi panutan bagi peserta didik, alih-alih mendorong penguatan karakter bangsa, persoalan-persoalan di luar kegiatan utama mendidik dan mengajar mendera. Padahal, keberadaan pendidik dan tenaga pendidikan dalam proses pembelajaran menjadi sangat penting bagi pengembangan karakter bangsa, terutama bagi peserta didik.

Pengembangan karakter bangsa hanya dapat dilakukan melalui pengembangan karakter individu seseorang, karena manusia hidup dalam lingkungan sosial dan budaya tertentu, maka pengembangan karakter individu seseorang hanya dapat dilakukan dalam lingkungan sosial dan budaya yang bersangkutan. Artinya, pengembangan budaya dan karakter bangsa hanya dapat dilakukan dalam suatu proses pendidikan yang tidak melepaskan peserta didik dari lingkungan sosial, budaya masyarakat, dan budaya bangsa. Kondisi lingkungan sosial, budaya masyarakat, dan budaya bangsa belum menjadikan administrator dan supervisor sebagai pengembang budaya dan karakter bangsa yang mumpuni.

Perbaikan Mutu Administrator dan Supervisor untuk Memperkuat Karakter Bangsa

Perubahan tata kelola administrator dan supervisor Indonesia sebagian besar didorong oleh semangat reformasi kekuasaan dan dilanjutkan dengan reformasi birokrasi yang terus berjalan sampai saat ini. Kebijakan administrator dan supervisor, secara umum manajemen pendidik dan tenaga kependidikan, mengalami pergeseran baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat lokal. Ashar (2012:58) menyebutkan bahwa pergeseran paradigma manajemen pendidik dan tenaga kependidikan dari sentralistik menuju manajemen pendidik dan tenaga kependidikan desentralistik merupakan fenomena yang pernah dialami oleh sebagian besar negara-negara maju dalam mengatasi permasalahan mutu pendidikan yang dihadapinya. Secara konseptual, terdapat dua jenis desentralisasi pendidikan, yaitu: *pertama*, desentralisasi kewenangan di sektor pendidikan dalam hal kebijakan pendidikan dan aspek pendanaannya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (propinsi dan kabupaten/kota) sebagai otonomi daerah dan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan dari pusat ke daerah, dan *kedua*, desentralisasi pendidikan dengan fokus pada pemberian kewenangan yang lebih besar di tingkat sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Persoalannya perubahan manajemen pendidik dan tenaga kependidikan Indonesia seperti disebutkan bagian-bagian sebelumnya menyisakan kebimbangan terhadap kemungkinan perbaikan karakter bangsa. Bagaimana mungkin memperbaiki karakter bangsa dengan mutu pendidik dan tenaga pendidik terbatas. Padahal seperti

ditekankan oleh Arifin (2012:200), bahwa salah satu hal yang sangat penting membentuk bangsa yang berkarakter akan efektif bilamana diberikan pada konteks pendidikan, baik di sekolah, kultur sekolah, maupun komunitas luas.

Pertama, mengoptimalkan peran pendidikan nasional yang berfungsi mengembangkan kemampuan, membentuk watak serta peradaban bangsa, dan diwujudkan dalam suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Landasan yang digunakan yaitu pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa.

Bingkai karakter bangsa adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan (*virtues*) yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Kebajikan terdiri atas sejumlah nilai, moral, dan norma, seperti jujur, berani bertindak, dapat dipercaya, dan hormat kepada orang lain (Balitbang Depdiknas, 2010: 3). Interaksi seseorang dengan orang lain menumbuhkan karakter masyarakat dan karakter bangsa, termasuk didalamnya proses pembelajaran di lembaga pendidikan.

Untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, mengembangkan kemampuan, dan membentuk watak serta peradaban bangsa, maka peran pendidik dan tenaga pendidikan menjadi penting. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Sedangkan tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Upaya mengoptimalkan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan biasa disebut dengan manajemen pendidik dan tenaga kependidikan.

Kedua, karakter bangsa yang dibentuk pendidikan membutuhkan keteladanan dari pendidik dan tenaga kependidikan. Bahwa aturan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan yang banyak dilakukan oleh pemerintah belakangan ini, semestinya tidak sekedar menjadikan pendidik dan tenaga kependidikan menjadi mesin birokrasi semata-mata. Pendidik dan tenaga kependidikan merupakan para profesional semestinya lebih menonjol dibandingkan aspek birokrasinya.

Profesional digambarkan Case (2009:8) memiliki tiga karakteristik: pelatihan khusus yang diperoleh lewat pendidikan formal, pengakuan publik terhadap otonomi komunitas praktisi untuk mengatur standar pelaksanaan profesi itu, dan komitmen untuk memberikan layanan kepada publik yang lebih penting dari kesejahteraan ekonomi praktisi. Tiga karakteristik profesional memiliki makna bahwa pendidik dan tenaga kependidikan merupakan sebuah pekerjaan yang didalamnya terdapat tugas-

tugas dan tanggung jawab seperti yang tersebut dalam suatu pekerjaan profesional. Amstrong (1977:32) membagi tugas dan tanggung jawab pendidik menjadi lima, yaitu tanggung jawab pengajaran, tanggung jawab bimbingan, pengembangan kurikulum, pengembangan profesi dan membina hubungan dengan masyarakat.

Ketiga, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan sejak dari awal pendidikan di LPTK. Perlu dilakukan perbaikan manajemen pendidik dan tenaga kependidikan, hal ini perlu ditekankan kepada calon-calon pendidik dan tenaga kependidikan. Bahwa pendidikan bukan sekedar kegiatan birokrasi, melainkan usaha membangun karakter manusia, watak, budaya sekolah yang kondusif, dan usaha melahirkan karakter bangsa yang mumpuni. Upaya sungguh-sungguh dari LPTK tersebut untuk menghapus kesan pendidik dan tenaga kependidikan yang saat ini sibuk dengan tetek bengek administratif sertifikasi dan mengabaikan upaya-upaya edukatif.

Keempat, karena berbeda dari materi ajar yang bersifat *mastery*, sebagaimana halnya suatu *performance content* suatu kompetensi, karakter bangsa bersifat *developmental* (Balitbang, 2010). Materi pendidikan yang bersifat *developmental* menghendaki proses pendidikan yang cukup panjang dan bersifat saling menguat (*reinforce*) antara kegiatan belajar dengan kegiatan belajar lainnya, antara proses belajar di kelas dengan kegiatan kurikuler di sekolah dan di luar sekolah. Pembentukan karakter bangsa perlu keteladanan dan perilaku otentik dari pendidikan dan tenaga kependidikan. Oleh karenanya perlu manajemen sekolah yang terpadu dan memiliki sistem yang baik untuk mendorong pertumbuhan karakter bangsa.

Kelima, kurikulum adalah jantungnya pendidikan (*curriculum is the heart of education*) dan memaknainya perlu cakrawala pengetahuan yang luas bukan sempit. Kurikulum sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran memberikan makna bahwa di dalam kurikulum terdapat panduan interaksi antara pendidik dan peserta didik. Dengan demikian, kurikulum berfungsi sebagai “nafas atau inti” dari proses pendidikan di sekolah untuk memberdayakan potensi karakter bangsa peserta didik. Sebagai dokumen tertulis kurikulum tidak hanya terdiri atas mata pelajaran (*course of study*), atau uraian isi mata pelajaran (*course content*) atau persiapan mengajar (*teaching preparation*) dalam bentuk silabus dan satuan pelajaran (*sillaby and lesson unit*), tetapi mencakup semua dokumen tertulis yang berkaitan dengan rencana pembelajaran/pembelajaran. Implementasi kurikulum seharusnya dimaknai sebagai semua rancangan yang berfungsi mengoptimalkan perkembangan peserta didik, dan semua pengalaman belajar yang diperoleh peserta didik berkat arahan, bimbingan, dan dipertanggung jawabkan oleh sekolah. Melalui pemaknaan kurikulum seperti itu karakter bangsa dapat tumbuh dan bersemi dengan baik.

Penguatan Kompetensi Administrator dan Supervisor Persekolahan

Baik di negara maju maupun di negara yang sedang berkembang, baru profesi di bidang kedokteran, hukum, dan beberapa bidang teknik yang sudah terbangun dengan baik, kuat dan ditaati dalam pengisian okupasi. Misalnya untuk mengisi jabatan kepala Puskesmas harus seseorang yang memiliki sertifikasi profesi sebagai dokter. Demikian pula untuk mengisi jabatan penasehat hukum seseorang harus mempunyai sertifikasi di bidang profesi hukum (Nurhadi, 2010:3). Sementara itu pada saat ini profesi di bidang pendidikan terus menerus dilakukan pembenahan, tidak terkecuali pendidik (guru) sebagai sumber utama untuk mengisi jabatan kepala sekolah.

Pembenahan guru sebagai sumber utama untuk jabatan kepala sekolah memerlukan karir profesional yang memadai, sebab kepala sekolah merupakan tugas tambahan bagi guru. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik.

Struktur birokrasi di sekolah puncaknya berada di tangan kepala sekolah. Akadun (2009:133) dalam penelitiannya menyebutkan peningkatan kinerja guru dapat dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala sekolah, motivasi guru, peraturan pendidikan, sumber daya keuangan, sarana dan prasarana pendidikan, mutu pendidikan, dan *raw input*.

Kepala sekolah memegang peran strategis dalam pengembangan sekolah. guru bagus ditambah dengan kepala sekolah bagus sama dengan sekolah bagus. Pemimpin (kepala sekolah) adalah kunci dari keberhasilan sebuah perubahan besar dalam organisasi (pendidikan). Bila pemimpin mampu bersuara cerdas, untuk sebuah perubahan dengan tujuan membangun manajemen yang solid dan kuat di dalam organisasinya, maka semua orang, semua unit kerja, dan semua aspek kerja, akan termotivasi untuk bergerak menjadi kuat dan menjadi lebih bergairah dalam etos kerja berkualitas tinggi.

Selain kompetensi yang harus dimiliki guru, strategi penyelenggaraan dan pemberdayaan guru oleh kepala sekolah juga mutlak diperlukan melalui pemberdayaan manajemen sekolah. Muniarti Ar (2009:126) dari hasil penelitiannya menyatakan bahwa perumusan strategi penyelenggaraan sekolah diawali dengan perumusan visi, misi, tujuan, sasaran, dan target sekolah. sedangkan strategi pemberdayaan manajemen dapat dilakukan melalui proses pembelajaran, kegiatan hubungan kerja sama, pengembangan sumber daya, dan menyosialisasikan eksistensi sekolah. untuk mewujudkan itu maka diperlukan kapabilitas kepemimpinan kepala sekolah yang mumpuni.

Kapabilitas kepemimpinan kepala sekolah dapat dilihat melalui kompetensinya mengelola sekolah. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah merupakan langkah perbaikan yang memperlihatkan keseriusan pemerintah membangun kompetensi kepala sekolah. Lahir kemudian

setelah peraturan pemerintah tersebut yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 28 Tahun 2010 tentang pemberian tugas tambahan guru sebagai kepala sekolah.

Kepala sekolah profesional berasal dari guru profesional. Guru profesional tentu diharapkan akan memperbaiki mutu pendidikan, dengan sendirinya dengan kepala sekolah profesional harapan perbaikan mutu menjadi lebih mudah tercapai. Profesional digambarkan Case (2009:8) memiliki tiga karakteristik: pelatihan khusus yang diperoleh lewat pendidikan formal, pengakuan publik terhadap otonomi komunitas praktisi untuk mengatur standar pelaksanaan profesi itu, dan komitmen untuk memberikan layanan kepada publik yang lebih penting dari kesejahteraan ekonomi praktisi.

Mutu pendidikan yang harus diperbaiki oleh pemerintah memang berat. Kalau memang data yang ditampilkan oleh pemerintah benar, maka hampir 50 persen sekolah disemua jenjang belum memenuhi standar pendidikan minimal. Artinya, masih banyak sekolah yang harus diperbaiki mutu layanan pendidikannya. Padahal beban tersebut harus ditambah dengan sekolah yang masih berada di standar minimal, yang tentu saja belum optimal mutu layanan pendidikannya.

Usman (2010:8) menyatakan bahwa kepemimpinan ini sering dikaitkan dengan manajemen pendidikan. Minimal terdapat empat hubungan yang ada: kepemimpinan yang terpisah dengan manajemen, kepemimpinan bagian manajemen, kepemimpinan tumpang tindih manajemen, dan manajemen bagian kepemimpinan. Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas manajemen pendidikan kepemimpinan pendidikan sekolah membutuhkan kredibilitas kepala sekolah. Kredibilitas tersebut yaitu keterampilan memimpin, membuat keputusan, berkomunikasi, dan manajemen diri sendiri.

Pemimpin harus memiliki kredibilitas dan reputasi yang hebat, agar ia mampu memberikan inspirasi dan motivasi kepada setiap orang. Memotivasi dan menginspirasi setiap orang dalam setiap detik di kehidupan mereka, untuk bersemangat dan bangkit bersama dengan perubahan baru. Dan membuat setiap orang menyadari bahwa perubahan itu penting, untuk mengubah hal-hal yang tertinggal zaman dengan hal-hal baru yang sesuai peradaban.

Kapabilitas kepemimpinan kepala sekolah adalah kemampuan yang dimiliki oleh kepala sekolah dalam aspek responsibilitas, koordinatif, memotivasi, mengilhami, dan memberdayakan warga sekolah (LPPKS, 2011). Senada dengan hal tersebut Soetopo (2010:6) menyatakan bahwa kapabilitas tersebut terbagi atas dua hal yaitu bertalian dengan tujuan yang hendak dicapai dan bertalian dengan penciptaan suasana pekerjaan yang sehat dan menyenangkan sambil memeliharanya.

Terdapat monitoring dan evaluasi (monev) kepemimpinan kepala sekolah yang dilakukan tahunan dan empat tahunan, sesuai dengan satu periode jabatannya. Monev tahunan dilakukan oleh pengawas, sementara monev empat tahunan dilakukan atasan langsung (dengan pertimbangan dari pengawas satuan pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan komite sekolah). Hasil monev digunakan untuk peningkatan kinerja

lembaga dan pemberian sanksi apabila ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan standar dan kualitas penyelenggara diklat yang telah ditetapkan.

Penguatan kompetensi yang dimaksud yaitu penguatan untuk administrator dan supervisor persekolahan yang terdidik untuk mencapai mutu pendidikan terbaik. Penguatan tersebut berada di antara pendulum guru dan kepala sekolah, guru yang akan menjadi atau calon kepala sekolah. Semua guru mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala sekolah, tetapi sesuai syarat yang ada guru profesional semestinya memiliki peluang lebih besar. Kemampuan calon kepala sekolah sebagai administrator dan supervisor menjadi kebutuhan selanjutnya, guru profesional perlu mendapatkan bekal kompetensi ini. Bekal tersebut menjadikan administrator dan supervisor persekolahan terdidik dan karenanya perbaikan mutu pendidikan akan lebih mudah tercapai.

Kompetensi yang semestinya dimiliki oleh administrator dan supervisor pesersekolahan yaitu penguasaan terhadap substansi manajemen pendidikan. Administrator dan supervisor pesersekolahan harus mampu mengoptimalkan kinerja setiap substansi untuk mencapai tujuan pendidikan yang sudah ditentukan. Substansi manajemen pendidikan ini memiliki unsur-unsur/substansi. Unsur-unsur substansi/garapan garapan itu meliputi (1) kurikulum dan pembelajaran; (2) peserta didik; (3) pendidik dan tenaga kependidikan; (4) keuangan pendidikan; (5) sarana dan prasarana; dan (6) partisipasi masyarakat. Purwanto (2009:14) menyatakan bahwa semua kegiatan sekolah akan dapat berjalan lancar dan berhasil baik jika pelaksanaannya melalui proses-proses yang terdapat dalam unsur-unsur substansi/garapan tersebut.

Penutup

Landasan legal formal mengenai karakter bangsa dapat ditemui dalam pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa. Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan Indonesia memang mulai menampakkan kecenderungan membaik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah delapan tahun terakhir juga menunjukkan perhatian terhadap pendidik dan tenaga kependidikan ini semakin baik. Selain kemajuan tersebut, administrator dan supervisor, secara luas manajemen pendidik dan tenaga kependidikan masih menghadapi masalah, salah satunya yaitu pembentukan karakter bangsa yang belum optimal dilakukan.

Berapa usulan yang dapat penulis sampaikan untuk perbaikan karakter bangsa untuk penguatan administrator dan supervisor yaitu: (1) Mengoptimalkan peran pendidikan nasional yang berfungsi mengembangkan kemampuan, membentuk watak serta peradaban bangsa, dan diwujudkan dalam suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya; (2)

Karakter bangsa yang dibentuk pendidikan membutuhkan keteladanan dari administrator dan supervisor; (3) pembinaan administrator dan supervisor dilakukan sejak dari awal pendidikan di LPTK; (4) Karena berbeda dari materi ajar yang bersifat *mastery*, sebagaimana halnya suatu *performance content* suatu kompetensi, karakter bangsa bersifat *developmental*; dan (5) Kurikulum adalah jantungnya pendidikan (*curriculum is the heart of education*) dan memaknainya perlu cakrawala pengetahuan yang luas bukan sempit.

Referensi

- Arifin, I. 2012. Kompetensi Kepribadian Kepala Sekolah Berbasis Moral Spiritual dalam Mengimplementasi Pendidikan Karakter. *Prosiding Konferensi dan Seminar Internasional ICEMAL Penguatan Manajemen Pendidikan Nasional untuk Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Mutu, Relevansi, Kesetaraan & Kepastian dalam Memperoleh Layanan Pendidikan di Indonesia*. Malang: Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang.
- Balitbang Depdiknas. 2010. *Pedoman Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa*. Jakarta: Balitbang Depdiknas.
- Case, K.A.N.2009. *Guru profesional Penyiapan dan Bimbingan Praktisi Pemikir*. Jakarta: Indeks.
- Joni, R .T. 1991. *Strategi Belajar Mengajar, Suatu Tinjauan Pengantar*. Jakarta: P3G Depdikbud.
- Kompas, Rabu 4 Mei 2011
- Kompas, Sabtu 4 Agustus 2012. Nilai Rata-rata Sementara UKG 44,5 Hanya 10 Persen Guru Mendapat Nilai di Atas 70.
- Maisyaroh,dkk (editor). 2004. *Perspektif Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Mendler, A.N. 2010. *Mendidik dengan Hati Kiat Membina Hubungan Belajar Mengajar yang Akrab dengan Murid*. Bandung: Kaifa.
- Schneider, B., & Stevenson, D. (1999). *The Ambitious Generation: America's Teenagers, Motivated but Directionless*. New Haven, Conecticut: Yale University Press.
- Soeharto, K. 2010. Analisis Interpretasi Elit Pendidikan Indonesia tentang Ideologi Pendidikan Nasional. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*. Volume 17 Nomor 1 April 2010: 68 - 81. Malang: LP3 Universitas Negeri Malang.
- Suratman, B. 2010. Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah, Ketersediaan Sarana Prasarana, Kapabilitas Mengajar Guru, dan Dukungan Orang Tua, Kaitannya dengan Prestasi Belajar Siswa SMP Negeri di Kota Surabaya. *Jurnal*

Pendidikan dan Pembelajaran. Volume 17 Nomor 1 April 2010: 89 – 97 .
Malang: LP3 Universitas Negeri Malang.

Triwiyanto, T. 2011. Kesulitan-Kesulitan Penyebab Kegagalan Guru SD Dalam Program Sertifikasi Melalui Penilaian Portofolio. *Jurnal Pendidikan & Pembelajaran*, Volume 18 Nomor 2 Oktober 2011:145 -158.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Wiyono, B.B dan Maisyaroh.2008. Pengembangan Model Pembelajaran Barbasis Portofolio (Portofolio Based Learning) pada Mata Kuliah Manajemen Hubungan Masyarakat. *Jurnal Manajemen Pendidikan*. Volume 22 Nomor 1 Maret 2008:1-12.

**FACULTY OF EDUCATION
UNIVERSITAS INTEGRI MEDAN**



Certificate

No. 0164/Pan/FIP-JIP/2013

Awarded to

Teguh Triwiyanto, S.Pd, M.Pd

as

Speaker

in a FIP-JIP Forum and International Seminar with the theme:

“STRENGTHENING EDUCATIONAL SCIENCES FOR THE CREATION OF EDUCATED GRADUATES IN THE IMPLEMENTATION OF 2013 CURRICULUM”

Organized by The Faculty of Education, Universitas Negeri Medan (UNIMED),
in Medan from 29th – 31th October 2013.



Dr. Ibnu Hajar, M.Si.
Dean, Unimed

Drs. Nasrun, MS,
Dean, Faculty of Education, Unimed